

HUBUNGAN KEPADATAN KOPERASI DAN KEPUTUSAN MENGAKSES PEMBIAYAAN KOPERASI

(Cooperative Density and Decision to Access Cooperative Financing)

Nopitasari* dan Dwini Handayani**

Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia

Jl. Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo, Depok, Jawa Barat, Indonesia

*Email: nopitasari7@gmail.com dan **Email: dwiniarianto@yahoo.com

Naskah diterima: 1 Juli 2020

Naskah direvisi: 16 Juli 2020

Naskah diterbitkan: 31 Desember 2020

Abstract

Cooperative is a financial institution capable of providing financing for MSMEs which are still constrained by capital problems. Many MSMEs are constrained by financing problems, this indicates high demand for funding but there is a limited number of cooperative which can provide financing for MSMEs. Indonesia has the largest area where Cooperative is not spread evenly so that many households have difficulties in accessing financing from Cooperative. In this study, Cooperatives' accessibility is proxied to its density. The purpose is to identify the relationship between the density of cooperatives and the decision to access Cooperative financing by using Susenas of March 2018 data and a sample of 283,478 households. By identifying the relationship, it would be recognizable whether Cooperative is still becoming a financing alternative or not. Based on the results of the Multinomial Logit Regression, the density of Cooperative is related to the decision of households to access financing from Cooperative. The density of cooperative improves the decision taken by households to access financing from Cooperative. The increase in the number of cooperatives will increase financial inclusion as well, which is helpful for people who need loans. The Indonesian government needs to conduct cooperative development programs to increase financial inclusion. However, the density of Cooperative doesn't significantly influence the household decision to access financing from institutions other than cooperative. Thus, cooperative development programs should be implemented in areas where there are no financial institutions yet.

Keywords: cooperative, microfinance, access to finance, household

Abstrak

Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan yang dapat memberikan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang masih terkendala masalah modal. Banyaknya jumlah UMKM yang terkendala masalah pembiayaan mengindikasikan terdapat banyaknya permintaan akan pembiayaan namun belum diimbangi dengan jumlah koperasi yang dapat memberikan pembiayaan kepada UMKM. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, saat ini sebaran koperasi belum merata ke setiap wilayah Indonesia sehingga banyak rumah tangga yang terkendala aksesibilitas untuk mengakses pembiayaan koperasi. Pada penelitian ini aksesibilitas koperasi diproksikan dengan kepadatan koperasi. Pada penelitian ini bertujuan mengidentifikasi hubungan antara kepadatan koperasi terhadap keputusan mengakses pembiayaan koperasi dengan data Susenas Maret 2018 dan sampel sebanyak 283.478 rumah tangga. Dengan mengidentifikasi hubungan tersebut, dapat diketahui apakah koperasi masih menjadi salah satu alternatif pilihan pembiayaan atau bukan. Berdasarkan hasil regresi Multinomial Logit menunjukkan bahwa kepadatan koperasi mempunyai hubungan terhadap keputusan rumah tangga mengakses pembiayaan di koperasi. Kepadatan koperasi meningkatkan keputusan mengakses pembiayaan pada rumah tangga di koperasi. Bertambahnya jumlah koperasi akan meningkatkan inklusi keuangan sehingga dapat membantu masyarakat yang membutuhkan pinjaman. Pemerintah perlu melakukan program penumbuhan koperasi di Indonesia dalam rangka peningkatan inklusi keuangan. Namun kepadatan koperasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan rumah tangga mengakses pembiayaan di selain koperasi, sehingga program penumbuhan koperasi sebaiknya dilakukan pada daerah yang belum terdapat lembaga keuangan pada daerah tersebut.

Kata kunci: koperasi, keuangan mikro, akses pembiayaan, rumah tangga

PENDAHULUAN

Keuangan mikro muncul di negara berkembang dengan tujuan utamanya adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan memberikan akses ke layanan keuangan dasar bagi peminjam yang secara tradisional didiskriminasi oleh lembaga perbankan formal (Besley & Coate, 1995; Ghalib et al., 2011; Imai et al., 2010). Keuangan mikro memberikan jasa berupa pembiayaan mikro kepada rumah tangga untuk menambah pendapatan dan mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat

berpenghasilan menengah ke bawah dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Fenton et al., 2017). Salah satu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada di Indonesia adalah koperasi.

Koperasi merupakan suatu badan usaha yang mengelola kegiatan usaha berlandaskan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Koperasi memiliki ciri khas tersendiri yang membedakan dengan lembaga keuangan lainnya, di antaranya koperasi bukan milik individu/perorangan akan tetapi milik anggota, di mana anggota adalah pemilik,

pelanggan dan majikan pada waktu bersamaan serta tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya (Ahsan & Nurmayanti, 2016). Selain itu jaminan bagi eksistensi koperasi sangat kuat, karena merupakan kehendak dari Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang termuat pada penjabaran UUD Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1).

Kontribusi koperasi dan UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mengalami peningkatan yaitu sampai tahun 2016 sebesar 59,84 persen kemudian meningkat menjadi sebesar 61,07 persen pada tahun 2018. Tingginya kontribusi koperasi terhadap PDB bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta pengentasan kemiskinan (Kemenkop, 2018). Koperasi dapat menjadi lembaga yang efektif dalam memutus lingkaran kemiskinan terutama di perdesaan (Bharadwaj, 2012; Verhofstadt & Maertens, 2015).

Tingkat kemiskinan Indonesia pada bulan Maret 2019 sebesar 9,41 persen atau turun 0,41 persen dibanding Maret 2018. Pada Maret 2019 jumlah penduduk miskin sebanyak 25,14 juta orang, atau berkurang 810 ribu orang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2018. Akan tetapi, penurunan tingkat kemiskinan tidak dialami oleh seluruh daerah di Indonesia. Terdapat enam provinsi yang mengalami kenaikan tingkat kemiskinan yaitu Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Papua, Kalimantan Barat, dan Maluku Utara (Badan Pusat Statistik, 2019).

Peran koperasi dalam pengentasan kemiskinan dilakukan melalui pemberdayaan UMKM yang merupakan pelaku usaha mayoritas di Indonesia. UMKM memiliki pangsa sekitar 99,99 persen (64,2 juta unit) dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia, sementara usaha besar hanya sebanyak 0,01 persen atau sekitar 5.550 unit (Indrawan, 2019). Kendala yang dihadapi oleh UMKM di antaranya adalah masalah pendanaan untuk modal usaha. Sekitar 60-70 persen UMKM belum mendapat akses atau pembiayaan perbankan, yang di antaranya disebabkan oleh hambatan geografis, belum banyak perbankan mampu menjangkau hingga ke daerah pelosok dan terpencil serta masalah administratif (Bank Indonesia & LPPI, 2015). Dalam rangka mengatasi kendala tersebut, muncul dan berkembang banyak LKM di Indonesia. Koperasi merupakan salah satu alternatif LKM untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Data dari Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2018 mencatat jenis koperasi didominasi oleh jenis dan unit simpan pinjam yaitu sebanyak 64.852 unit (51,33 persen) dari total jumlah koperasi sebanyak 126.343. Koperasi yang kegiatan usahanya

menerima simpanan dan memberikan pinjaman kepada anggotanya disebut Koperasi Simpan Pinjam (KSP) jika menggunakan pola konvensional dan Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) jika menggunakan pola syariah. Jumlah koperasi yang banyak menjadikan koperasi mempunyai peran cukup penting dalam perekonomian nasional, di antaranya yaitu dalam memberikan layanan keuangan mikro bagi para pelaku usaha terutama UMKM dan melayani kebutuhan masyarakat. Selain itu agar masyarakat terhindar dari rentenir.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2018, jumlah koperasi terus mengalami peningkatan, namun masih banyak masyarakat yang belum memiliki akses terhadap produk dan layanan koperasi. Walaupun jumlah koperasi mayoritas di Pulau Jawa, tetapi sebaran koperasi tidak hanya terpusat di Pulau Jawa saja, sudah mulai menyebar ke kota-kota kecil, namun masih belum merata atau masih terjadi ketimpangan terutama di luar Pulau Jawa. Sebaran lokasi koperasi masih belum merata, di mana jumlah koperasi terbanyak berada di Pulau Jawa khususnya di Provinsi Jawa Timur, yaitu 24.024 unit dan jumlah koperasi paling sedikit berada di Provinsi Kalimantan Utara yaitu sebanyak 460 koperasi. Kondisi tersebut menyebabkan calon anggota potensial sulit menjangkau layanan koperasi sehingga menjadi salah satu alasan hambatan untuk mengakses koperasi.

Layanan keuangan dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan di satu sisi dan untuk *consumption smoothing* di sisi lain. Dalam model siklus hidup (*life-cycle model*) mengasumsikan bahwa seorang individu akan *consumption smoothing* di sepanjang hidupnya, dikarenakan adanya fluktuasi pendapatan yang diperoleh dari bekerja dan perubahan jumlah anggota rumah tangga dari waktu ke waktu (Modigliani, 1986; Zeller, 2001).

Zeller (2001) juga menjelaskan seseorang dapat melakukan *consumption smoothing* melalui simpanan, pinjaman, atau asuransi. Asuransi dan tabungan adalah strategi *ex-ante* yaitu, preventif untuk *consumption smoothing*, sedangkan pinjaman untuk konsumsi digunakan untuk *ex-post* ketika ada musibah. Oleh karena itu, sebuah rumah tangga yang mengalami penurunan pendapatan secara tiba-tiba karena guncangan serius, seperti penyakit atau kematian anggota rumah tangga yang berpenghasilan, dapat diperkirakan akan lebih mungkin untuk mengakses pinjaman.

Pada pasar keuangan, keseimbangan akan terjadi jika jumlah permintaan pembiayaan sama dengan jumlah penawaran di mana pasar menjadi alokasi sumber daya yang efisien. Namun pada kenyataannya sering terjadi kegagalan pasar, di

antaranya disebabkan oleh asimetri informasi dan biaya transaksi. Asimetri informasi mengakibatkan lembaga keuangan tidak mengetahui preferensi risiko peminjam (Stiglitz & Weiss, 1981). Hambatan dalam mengakses pembiayaan di antaranya mengenai akses ke layanan keuangan karena tidak ada lembaga keuangan di daerah tersebut, seperti halnya di banyak daerah pedesaan terpencil. Selain itu persyaratan peraturan yang dirancang dengan buruk, maupun karena kesulitan masyarakat untuk mengakses pembiayaan mengurangi permintaan akan pembiayaan.

Permintaan jumlah pembiayaan yang besar, namun tidak diimbangi dengan banyaknya jumlah penawaran mengakibatkan adanya kelebihan permintaan. Sehingga tidak terjadi perpotongan antara kurva permintaan dan penawaran. Agar terjadi perpotongan antara kurva permintaan dan penawaran maka perlu menggeser kurva penawaran ke sebelah kanan (S') sehingga meningkatkan jumlah permintaan pembiayaan dari L^0 ke L' . (World Bank, 2008) seperti dapat dilihat pada Gambar 1. Kurva penawaran dapat digeser ke sebelah kanan salah satunya dengan cara meningkatkan jumlah produsen, atau pada pasar keuangan meningkatkan jumlah lembaga keuangan. Dengan meningkatnya jumlah lembaga keuangan meningkatkan akses pembiayaan.

Dengan adanya penambahan penawaran diharapkan dapat meningkatkan permintaan pembiayaan sesuai dengan teori ekonomi klasik yaitu Teori *Supply Creates its Own Demand* yang dikemukakan Jean Baptiste Say. Teori ini dikenal dengan nama Hukum Say. Teori *Supply Creates its Own Demand* menjelaskan bahwa setiap barang dan jasa yang diproduksi akan terserap oleh permintaan sampai tercapai keseimbangan pasar, dengan asumsi

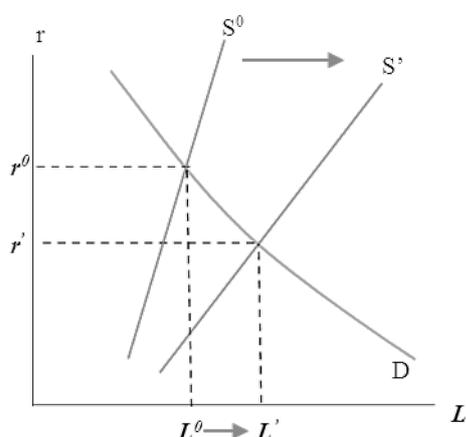
bahwa struktur pasar persaingan sempurna, tidak ada asimetris informasi dan input *output* homogen, para pelaku ekonomi bersifat rasional dan bertujuan memaksimalkan profit, dan netralitas uang, di mana harga bersifat fleksibel.

Dalam hal kepadatan koperasi dan keputusan mengakses pembiayaan, peningkatan jumlah koperasi dalam suatu wilayah diharapkan dapat mengikuti teori *Supply Creates its Own Demand*. Sehingga jika bertambahnya jumlah koperasi (*supply*) akan meningkatkan permintaan pembiayaan (*demand*) khususnya permintaan pembiayaan pada koperasi. Inklusi keuangan merupakan akses dan penggunaan jasa keuangan formal baik oleh rumah tangga ataupun perusahaan dan sangat menentukan perkembangan ekonomi (Fungáčová & Weill, 2015). Inklusi keuangan terdiri dari empat komponen yaitu akses, penggunaan, kualitas, dan kesejahteraan (Kabakova & Plaksenkov, 2018).

Salah satu untuk mengidentifikasi inklusi keuangan dapat dilihat dari ketersediaan layanan keuangan yang dapat diakses masyarakat (jumlah lembaga keuangan) (Sarma, 2008). Banyak penelitian yang menunjukkan sebagian besar individu dan rumah tangga di seluruh dunia tidak memiliki akses pembiayaan kepada lembaga keuangan formal (Beck et al., 2005). Sama halnya dengan penelitian di Ghana bagian utara, jumlah lembaga keuangan di suatu daerah berhubungan positif dengan partisipasi masyarakat untuk mengikuti program pembiayaan mikro (Ayamga et al., 2006). Dengan mempertimbangkan luas setiap wilayah berbeda, maka jumlah lembaga keuangan dapat diprosikan dengan menggunakan kepadatan (John et al., 2011). Penelitian yang membahas tentang kepadatan lembaga keuangan, di antaranya mengungkapkan bahwa kepadatan cabang memiliki dampak positif yang kuat melakukan inklusi keuangan (Kumar, 2013).

Selain itu, kajian empiris di Indonesia yang membahas tentang faktor-faktor yang memengaruhi inklusi keuangan atau keputusan untuk akses pembiayaan sudah cukup banyak ditemukan, di antaranya menjelaskan bahwa karakteristik individu yang menjadi determinan inklusi keuangan di Indonesia adalah tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan usia (Nugroho & Purwanti, 2018).

Sementara itu, ada juga yang membahas tentang aksesibilitas keuangan mikro pada rumah tangga di pedesaan dipengaruhi oleh usia peminjam, pendapatan bulanan, suku bunga dan durasi pinjaman (Santoso & Gan, 2019). Penelitian lainnya menjelaskan bahwa akses terhadap lembaga keuangan mikro dipengaruhi oleh peranan religiusitas dan preferensi risiko (Rama, 2016).



Keterangan: D: permintaan, S: penawaran, L: jumlah pembiayaan, r: suku bunga

Sumber: World Bank, 2008 (dimodifikasi).

Gambar 1. Kurva Permintaan dan Penawaran

Aksesibilitas terhadap lembaga keuangan sangat memengaruhi terhadap inklusi keuangan (Sanjaya & Nursechafia, 2016). Kehadiran lembaga keuangan mendorong inklusi keuangan khususnya pinjaman. Semakin dekat dan semakin rata penyebaran lembaga keuangan, maka cenderung akan meningkatkan inklusi keuangan sehingga mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pinjaman (Brown et al, 2016; Kumar et al., 2019). Salah satu cara mengidentifikasi inklusi keuangan adalah ketersediaan layanan perbankan (jumlah cabang bank), jika pada koperasi dapat dilihat dari ketersediaan jumlah koperasi di suatu wilayah atau berapa jumlah koperasi di wilayah tersebut yang dapat diakses oleh masyarakat. Indonesia mempunyai luas wilayah (desa) yang berbeda-beda sehingga untuk melihat ketersediaan akses koperasi menggunakan kepadatan koperasi, di mana jumlah suatu lembaga dapat diproksikan dengan kepadatan lembaga tersebut (John et al., 2011). Oleh karena itu, keberadaan koperasi dalam suatu satuan wilayah tertentu diduga memengaruhi partisipasi masyarakat dalam mengakses keuangan di koperasi.

Dilatarbelakangi oleh masih banyak ditemukannya koperasi yang melakukan penyimpangan dan tidak aktif, maka Kementerian Koperasi dan UKM melakukan program reformasi koperasi yaitu salah satunya berupa reorientasi yakni mengubah paradigma pemberdayaan koperasi dari kuantitas menjadi kualitas dan telah membubarkan koperasi tidak aktif sebanyak 40.013 unit (Kementerian Koperasi dan UKM, 2018). Banyaknya jumlah UMKM yang terkendala masalah pembiayaan mengindikasikan terdapat banyaknya permintaan akan pembiayaan namun belum diimbangi dengan jumlah koperasi yang dapat memberikan pembiayaan kepada UMKM tersebut atau dengan kata lain terdapat masalah aksesibilitas untuk mengakses pembiayaan. Sehingga diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat mengetahui hubungan antara kepadatan koperasi (aksesibilitas koperasi) pada suatu wilayah terhadap keputusan mengakses pembiayaan di koperasi (permintaan akan pembiayaan di koperasi).

METODE

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data *cross-sectional* yang menggabungkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2018 dan data Potensi Desa (Podes) tahun 2018. Hasil Susenas Maret 2018 terpilih sebagai sampel karena memuat informasi tentang akses rumah tangga terhadap layanan keuangan. Data Podes memuat tentang informasi keberadaan lembaga keuangan di

tiap desa/kelurahan di Indonesia pada tahun 2018. Setelah menggabungkan data terdapat sebanyak 283.478 rumah tangga yang dianalisis. Selanjutnya data diolah dengan menggunakan pembobotan agar hasil analisis dapat merepresentasikan kondisi rumah tangga Indonesia.

Penelitian ini menggunakan data mikro Susenas Maret 2018 mengenai pemilihan untuk mengakses pembiayaan pada lembaga keuangan atau tidak dijadikan sebagai variabel terikat. Cara membuat variabel terikat didapatkan dari pertanyaan Susenas Maret 2018 pada Blok XVII Akses terhadap Layanan Keuangan, pertanyaan Nomor 1701, yang menanyakan "Dalam setahun terakhir, apakah ada anggota rumah tangga yang menerima kredit?". Jawaban dari pertanyaan tersebut dijadikan sebagai variabel pembiayaan dalam bentuk *dummy* kategori bernilai 1 untuk akses pembiayaan rumah tangga di koperasi, 2 untuk akses pembiayaan rumah tangga di selain koperasi (Kredit Usaha Rakyat/KUR, kredit dari bank umum selain KUR, kredit dari Bank Perkreditan Rakyat/BPR, Pegadaian, perusahaan *leasing*, Kelompok Usaha Bersama/KUBE/KUB, dan Badan Usaha Milik Desa/BUMDes dan lainnya) dan 0 untuk rumah tangga yang tidak mengakses pembiayaan.

Terdapat satu variabel penjelas utama dalam penelitian, yaitu kepadatan rumah tangga. Variabel kepadatan koperasi hasil proksi dari jumlah koperasi pada suatu daerah untuk melihat aksesibilitas pembiayaan koperasi. Cara membuat variabel ini merupakan hasil bagi antara jumlah koperasi terhadap luas daerah. Data jumlah koperasi didapatkan dari pertanyaan kuesioner Podes 2018 yaitu "Jumlah KUD yang menyediakan kredit usaha di desa" pada Blok XII-1204 dan "Jumlah koperasi (selain KUD) yang masih aktif/beroperasi, poin 2 Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) pada Blok XII-1205 serta data luas daerah didapatkan dari pertanyaan "Luas wilayah desa/kelurahan" pada Blok XI-1101.

Selain variabel penjelas utama, penelitian menggunakan beberapa variabel kontrol berupa karakteristik kepala rumah tangga (jenis kelamin, usia, pendidikan, dan status pekerjaan), karakteristik rumah tangga (kepemilikan rekening, jumlah anggota keluarga, pengeluaran rumah tangga, status kemiskinan, kepemilikan aset bergerak, kepemilikan tanah dan/atau rumah, pengusaha pada rumah tangga) dan karakteristik wilayah (daerah tempat tinggal, keberadaan lembaga keuangan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, dan pulau tempat tinggal). Untuk lebih jelasnya definisi variabel penelitian diberikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Definisi Variabel Penelitian

Variabel	Definisi
Terikat:	
Pembiayaan	<i>Dummy</i> variabel pemilihan pembiayaan rumah tangga, 1 untuk koperasi, 2 selain koperasi, 0 tidak mengakses pembiayaan
Penjelas Utama:	
Kepadatan_koperasi	Jumlah koperasi setiap km ² dalam satuan unit per km ²
Kontrol:	
Keberadaan lembaga keuangan	<i>Dummy</i> variabel keberadaan lembaga keuangan lain selain koperasi bernilai 1 jika ada lembaga keuangan, 0 jika tidak
Rekening	<i>Dummy</i> variabel kepemilikan rekening bernilai 1 jika salah satu anggota rumah tangga memiliki rekening, 0 jika lainnya
Jenis kelamin	<i>Dummy</i> variabel jenis kelamin Kepala Rumah Tangga (KRT) 1 jika KRT laki-laki, 0 jika lainnya.
Usia	Usia Kepala Rumah Tangga (KRT)
Pendidikan1	<i>Dummy</i> tingkat pendidikan terakhir KRT menengah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Sekolah Menengah Atas (SMA), 1 jika tingkat pendidikan terakhir KRT SMP atau SMA, 0 jika kurang dari SMP
Pendidikan2	<i>Dummy</i> tingkat pendidikan terakhir KRT atas (di atas SMA) 1 jika tingkat pendidikan terakhir KRT di atas SMA, 0 jika kurang dari SMP
Status kerja1	<i>Dummy</i> status kerja KRT 1 jika KRT pengusaha, 0 jika tidak bekerja
Status kerja2	<i>Dummy</i> status kerja KRT 1 jika KRT pegawai, 0 jika tidak bekerja
Aset	<i>Dummy</i> variabel kepemilikan aset bergerak bernilai 1 jika rumah tangga memiliki aset, 0 jika lainnya
Tanah	<i>Dummy</i> variabel kepemilikan tanah dan/rumah bernilai 1 jika rumah tangga memiliki tanah dan/ rumah, 0 jika lainnya
Jumlah art	Jumlah anggota rumah tangga.
<i>Ln</i> pengeluaran rt	Pengeluaran rumah tangga dalam bentuk <i>ln</i>
Status miskin	<i>Dummy</i> variabel status miskin yang bernilai 1 jika miskin, 0 lainnya.
Pengusaha	<i>Dummy</i> variabel keberadaan pengusaha dalam rumah tangga yang bernilai 1 jika ada pengusaha, 0 lainnya.
Dtt	<i>Dummy</i> daerah wilayah tempat tinggal yang bernilai 1 jika tinggal di perkotaan, 0 lainnya.
<i>Ln</i> pdrb	PDRB per kapita dalam bentuk <i>ln</i>
Pulau	<i>Dummy</i> pulau wilayah tempat tinggal yang bernilai 1 jika tinggal di Pulau Jawa, 0 luar Pulau Jawa.

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis.

Metode Analisis

Teori permintaan pembiayaan pada rumah tangga, mengasumsikan bahwa rumah tangga menentukan keputusan tempat untuk mengakses pembiayaan berdasarkan pertimbangan rasional. Rumah tangga memiliki preferensi di antara beberapa pilihan lembaga keuangan atau tidak mengakses pembiayaan dengan memaksimalkan utilitas terbatas pada aksesibilitas lembaga keuangan tersebut. Fungsi utilitas tersebut dapat dijabarkan dalam persamaan berikut:

$$U_j = \beta'X_j + \varepsilon_j, j = (1,2,3) \dots \dots \dots (1)$$

Di mana U_j adalah utilitas rumah tangga dengan pilihan lembaga keuangan j , β' adalah koefisien, X_j adalah variabel eksogen yang memengaruhi pemilihan lembaga keuangan yang satu dibanding yang lain atau tidak mengakses pembiayaan, dan ε_j adalah *error* model dan j adalah tiga pilihan keputusan rumah tangga mengakses pembiayaan.

Rumah tangga memilih salah satu dari tiga pilihan terkait dengan keputusan mengakses pembiayaan, yaitu mengakses pembiayaan di koperasi, mengakses pembiayaan di selain koperasi atau tidak mengakses pembiayaan. Peluang pemilihannya dapat diestimasi dengan menggunakan *Multinomial Logit Model* (MLM). MLM merupakan bentuk regresi di mana

hasil dari respons tidak berupa *dummy* (dua pilihan), namun berupa nominal dengan *outcome* lebih dari dua. (Gujarati & Porter, 2009). Model ini sesuai untuk studi pilihan keputusan mengakses pembiayaan dengan lebih dari dua pilihan.

Dalam MLM ini dapat dibentuk dua fungsi logit, sebagai berikut:

1. Fungsi logit Y = 1 relatif terhadap fungsi logit untuk Y = 0
2. Fungsi logit Y = 2 relatif terhadap fungsi logit untuk Y = 0

Di mana Y = 1 untuk rumah tangga memilih mengakses pembiayaan di koperasi, Y = 2 untuk rumah tangga memilih mengakses pembiayaan di selain koperasi dan Y = 0 untuk rumah tangga memilih mengakses pembiayaan di selain koperasi. Pada model ini Y = 0 dijadikan sebagai *base category* atau kategori pembanding (Nachrowi & Usman, 2002).

Berikut persamaan model tersebut:

Fungsi multinomial logit untuk Y = 1 relatif terhadap Y = 0

$$g_1(x) = \ln \left[\frac{P(Y = 1|x)}{P(Y = 0|x)} \right] = \ln \left[\frac{P1}{P0} \right] \dots\dots\dots (2)$$

$$g_1(x) = \beta_{10} + \beta_{11} \text{kepadatankoperasi} + \beta_{12}lk + \beta_{13}rek + \beta_{14} \text{jenis kelamin} + \beta_{15}umur + \beta_{16} \text{pendidikan1} + \beta_{17} \text{pendidikan2} + \beta_{18} \text{statuskerja1} + \beta_{19} \text{statuskerja2} + \beta_{110} \text{aset} + \beta_{111} \text{tanah} + \beta_{112} \text{jumlah art} + \beta_{113} \text{lnpengeluaran art} + \beta_{114} \text{status miskin} + \beta_{115} \text{pengusaha} + \beta_{116} \text{dtt} + \beta_{117} \text{lnpdrb} + \beta_{118} \text{pulau} + \varepsilon_1 \dots\dots\dots (3)$$

Fungsi multinomial logit untuk Y = 2 relatif terhadap Y = 0

$$g_2(x) = \ln \left[\frac{P(Y = 2|x)}{P(Y = 0|x)} \right] = \ln \left[\frac{P2}{P0} \right] \dots\dots\dots (4)$$

$$g_2(x) = \beta_{20} + \beta_{21} \text{kepadatankoperasi} + \beta_{22}lk + \beta_{23}rek + \beta_{24} \text{jenis kelamin} + \beta_{25}umur + \beta_{26} \text{pendidikan1} + \beta_{27} \text{pendidikan2} + \beta_{28} \text{statuskerja1} + \beta_{29} \text{statuskerja2} + \beta_{210} \text{aset} + \beta_{211} \text{tanah} + \beta_{212} \text{jumlah art} + \beta_{213} \text{lnpengeluaran art} + \beta_{214} \text{status miskin} + \beta_{215} \text{pengusaha} + \beta_{216} \text{dtt} + \beta_{217} \text{lnpdrb} + \beta_{218} \text{pulau} + \varepsilon_2 \dots\dots\dots (5)$$

Fungsi multinomial tersebut adalah fungsi multinomial logit pemilihan mengakses pembiayaan di koperasi dibandingkan dengan tidak mengakses pembiayaan; $g_2(x)$ adalah fungsi multinomial logit pemilihan mengakses pembiayaan di selain koperasi dibandingkan tidak mengakses pembiayaan; *kepadatan koperasi* adalah hasil bagi antara jumlah koperasi terhadap luas desa; keberadaan lembaga

keuangan lain (*lk*) adalah keberadaan bank umum pemerintah, bank umum swasta, BPR, *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), pegadaian dan agen bank di desa; kepemilikan rekening (*rek*) adalah kepemilikan rekening pada salah seorang anggota rumah tangga; *umur* adalah usia kepala rumah tangga; *jenis kelamin* adalah *dummy* jenis kelamin kepala rumah tangga; *pendidikan1* adalah *dummy* ijazah terakhir kepala keluarga jika tingkat menengah (setingkat SMP dan SMA); *pendidikan2* adalah *dummy* ijazah terakhir kepala keluarga jika tingkat tinggi (di atas SMA); *status kerja1* adalah *dummy* pekerjaan kepala keluarga sebagai pengusaha; dan *status kerja2* adalah *dummy* pekerjaan kepala keluarga sebagai pegawai; *aset* adalah *dummy* kepemilikan aset bergerak berupa komputer/laptop, emas, sepeda motor, perahu, perahu motor dan tv yang kemungkinan dapat dijadikan jaminan; *tanah* adalah *dummy* kepemilikan aset tidak bergerak berupa tanah dan/atau rumah; *jumlah art* adalah jumlah anggota rumah tangga; *ln pengeluaran art* adalah jumlah pengeluaran rumah tangga dalam bentuk ln; *status miskin* adalah *dummy* status ekonomi rumah tangga; *pengusaha art* adalah *dummy* keberadaan pengusaha dalam rumah tangga; *dtt* adalah daerah tempat tinggal rumah tangga responden; *lnpdrb* adalah rata-rata pendapatan yang diterima setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah kabupaten/kota dalam bentuk ln; dan *pulau* adalah *dummy* pulau tempat tinggal responden.

Sampel pada Susenas 2018 dirancang untuk dapat mewakili populasi seluruh penduduk Indonesia. Oleh karena itu, penyajian analisis deskriptif dilakukan dengan memasukkan variabel penimbang (*weight*) yang sudah tersedia di mikro data Susenas 2018 untuk dapat memberikan gambaran tentang populasi. Selain itu, dengan pertimbangan sampel yang digunakan dalam tingkat rumah tangga dan variabel utama dalam tingkat desa serta untuk mengurangi heteroskedastisitas antarrumah tangga, peneliti melakukan cluster standar *error* berdasarkan tingkat desa.

Penelitian ini menggunakan toleransi kesalahan (tingkat signifikansi) sebesar 10 persen untuk membuktikan hipotesis bahwa kepadatan koperasi berpengaruh positif terhadap keputusan mengakses pembiayaan koperasi atau semakin tinggi tingkat kepadatan koperasi maka peluang rumah tangga untuk mengakses pembiayaan di koperasi semakin besar. Dalam analisis regresi logistik multinomial akan dihasilkan nilai koefisien, namun pada model tidak dapat diinterpretasikan, hanya untuk menganalisis tanda (positif atau negatif). Sedangkan model dapat diinterpretasikan berdasarkan koefisien dalam bentuk *Relative Risk Ratio* (RRR)

atau rasio kecenderungan relatif yang merupakan kecenderungan rumah tangga dalam mengambil keputusan mengenai mengakses pembiayaan berdasarkan variabel bebasnya, relatif terhadap tidak mengakses pembiayaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Tabel 2 menunjukkan bahwa rumah tangga yang tidak mengakses pembiayaan di koperasi sebanyak 72,41 persen dari total rumah tangga di Indonesia. Sisanya sebesar 27,59 persen merupakan

rumah tangga yang mengakses pembiayaan. Persentase rumah tangga yang mengakses pembiayaan di koperasi sebanyak 5,17 persen, lebih sedikit dibandingkan dengan yang mengakses pada selain koperasi.

Rumah tangga yang mengakses di selain koperasi sebanyak 36,13 persen dan 63,87 persen rumah tangga yang di daerahnya terdapat lembaga keuangan, selebihnya belum ada lembaga keuangan. Selain itu, perbandingan antara rumah tangga yang memiliki rekening dan yang belum hampir sama,

Tabel 2. Distribusi Sampel Kategori Variabel Penelitian

Variabel	N	Persentase
Keputusan mengakses pembiayaan		
Koperasi	14.657	5,17
Selain koperasi	63.556	22,42
Tidak mengakses	205.264	72,41
Keberadaan lembaga keuangan lain		
Ada	181.062	63,87
Tidak ada	102.416	36,13
Kepemilikan rekening		
Memiliki rekening	165.602	58,42
Tidak memiliki	117.876	41,58
Jenis kelamin kepala rumah tangga		
Laki-laki	240.326	84,78
Perempuan	43.152	15,22
Pendidikan kepala rumah tangga		
Bawah (Setingkat SD ke bawah)	145.263	51,24
Menengah (Setingkat SMP dan SMA)	114.222	40,30
Atas (Di atas SMA)	23.993	8,46
Status pekerjaan		
Pengusaha	120.239	42,42
Pegawai	125.650	44,32
Tidak bekerja	37.589	13,26
Kepemilikan aset bergerak		
Memiliki aset	265.282	93,58
Tidak memiliki	18.196	6,42
Kepemilikan tanah dan/rumah		
Memiliki Tanah dan atau rumah	241.889	85,33
Tidak memiliki	41.589	14,67
Status kemiskinan		
Miskin	22.287	7,86
Tidak miskin	261.191	92,14
Ada pengusaha dalam rumah tangga		
Memiliki Usaha	152.326	53,74
Tidak memiliki	131.151	46,26
Daerah tempat tinggal		
Perkotaan	155.529	54,86
Perdesaan	127.949	45,14
Pulau tempat tinggal		
Pulau Jawa	168.617	59,48
Luar Pulau Jawa	114.861	40,52

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2018, diolah dengan penimbang. Penimbang yang digunakan adalah penimbang rumah tangga yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik. Penimbang digunakan dengan tujuan agar angka-angka pada tabel di atas dapat digeneralisir terhadap kondisi seluruh rumah tangga di Indonesia.

Tabel 3. Distribusi Sampel Numerik Variabel Penelitian

Variabel	Rata-rata	Standar Deviasi	Min.	Max.
Kepadatan koperasi	0,0046	0,03	0,00	2,86
PDRB per kapita	57.005,32	64.528,23	6.228,00	692.243,00
Jumlah ART	4,00	1,65	1,00	30,00
Pengeluaran RT	4.247.698,00	4.171.900,00	134.291,70	186.000.000
Umur	48,16	13,95	11,00	97,00

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2018, diolah dengan penimbang. Penimbang yang digunakan adalah penimbang rumah tangga yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik. Penimbang digunakan dengan tujuan agar angka-angka pada tabel di atas dapat di generalisir terhadap kondisi seluruh rumah tangga di Indonesia.

yaitu yang memiliki rekening sebanyak 58,42 persen selebihnya belum memiliki rekening.

Karakteristik individu kepala rumah tangga mayoritas berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 84,78 persen selebihnya adalah perempuan. Untuk pendidikan tingkat bawah (setingkat SD ke bawah) sebanyak 51,24 persen, sedangkan yang berpendidikan tingkat menengah sebanyak 40,3 persen dan tingkat atas hanya sebanyak 8,46 persen. Mayoritas kepala rumah tangga bekerja sebagai pegawai, yaitu sebanyak 44,32 persen, sedangkan sebagai pengusaha sebanyak 42,42 persen dan tidak bekerja sebanyak 13,26 persen.

Sebagian besar rumah tangga memiliki aset bergerak yaitu sebanyak 93,58 persen. Aset tersebut dapat dijadikan sebagai jaminan saat melakukan pembiayaan. Sama halnya dengan aset bergerak, persentase rumah tangga yang memiliki tanah dan/atau rumah sebanyak 85,33 persen. Perihal status ekonomi mayoritasnya adalah rumah tangga tidak miskin sebesar 92,14 persen, selebihnya adalah masyarakat miskin. Persentase rumah tangga yang memiliki salah seorang atau lebih anggota rumah

tangganya sebagai pengusaha sebanyak 53,74 persen. Mayoritas masyarakat dalam penelitian ini menunjukkan bertempat tinggal di perkotaan yaitu sebanyak 54,86 persen, selebihnya tinggal di pedesaan dan berada di Pulau Jawa sebanyak 59,48 persen, selebihnya tinggal di luar Pulau Jawa.

Tabel 3 menunjukkan kepadatan koperasi rata-rata koperasi dalam radius 1 km pada suatu desa. Nilai rata-rata kepadatan koperasi adalah 0,0046, artinya secara rata-rata tidak ada koperasi dalam satu km² pada suatu desa. Kepadatan koperasi 0 menunjukkan tidak ada koperasi dalam radius satu km² pada suatu desa. Untuk lebih jelasnya kepadatan koperasi dapat dilihat pada Gambar 2. Sedangkan kepadatan koperasi maksimal 2,86 atau dibulatkan menjadi 3 menunjukkan bahwa terdapat paling banyak di desa terdapat 3 koperasi dalam 1 km². Untuk jumlah anggota rumah tangga pada sampel penelitian rata-ratanya sebanyak 4, artinya rata-rata jumlah anggota rumah tangga yaitu sebanyak 4 orang dan pengeluaran rumah tangga, rata-ratanya sebesar Rp4.247.698 per bulan. Usia kepala rumah tangga yang menjadi sampel dalam penelitian ini rata-rata berusia 48 tahun.



Sumber: Podes 2018 (diolah).

Gambar 2. Kepadatan Koperasi di Indonesia

Pada bagian ini akan menganalisis bagaimana Model Multinomial Logit menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan masyarakat mengakses pembiayaan, serta menentukan probabilitas masyarakat mengakses pembiayaan. Variabel terikat terdiri dari pembiayaan koperasi, pembiayaan selain koperasi dan lainnya (tidak mengakses pembiayaan). Ketiga kategori tersebut merupakan menjadi pilihan yang dipilih oleh masyarakat,

Model ini menggunakan *base category*. *Base category* merupakan kategori yang dianggap tetap dan menjadi pembanding dengan kategori lain, Tujuan menggunakan *base category* adalah untuk memudahkan menginterpretasikan hasil estimasi

model (Probokawuryan, 2015). Pemilihan *base category* didasarkan jumlah terbanyak, di mana kategori dengan responden terbanyak yaitu pada kategori lainnya (tidak mengakses pembiayaan). Hasil pengolahan data terlihat dari Tabel 5.

Hasil regresi pada Tabel 5 menunjukkan bahwa kepadatan koperasi dan karakteristik sosial-ekonomi secara bersama-sama mampu menjelaskan variabel keputusan rumah tangga untuk mengakses yang ditunjukkan nilai Prob > X^2 sebesar 0,000. Melalui uji Wald, secara parsial terlihat bahwa keputusan mengakses pembiayaan di koperasi menunjukkan hampir semua variabel bebas mempunyai hubungan signifikan terhadap variabel terikat. Variabel

Tabel 5. Hasil Regresi Multinomial Logit dan *Risk Relative Ratio*

Variabel	Koefisien	RRR
Tidak Megakses Pembiayaan (<i>Base Category</i>)		
Koperasi		
Kepadatan koperasi	1,226*	3,407*
	-0,654	2,229
<i>Dummy</i> keberadaan lembaga keuangan lain (1 = Ya)	0,101*** -0,031	1,106*** 0,033
<i>Dummy</i> kepemilikan rekening (1 = Ya)	0,695*** -0,026	2,004*** 0,051
Jenis kelamin (1 = Laki-laki)	0,079** -0,032	1,081** 0,034
Umur	-0,0032*** -0,001	0,996*** 0,001
Pendidikan tingkat menengah KRT (Setingkat SMP dan SMA)	0,048** -0,023	1,048** 0,024
Pendidikan tingkat atas KRT (Di atas SMA)	-0,160*** -0,040	0,852*** 0,033
KRT bekerja sebagai pengusaha	0,247*** -0,045	1,280*** 0,057
KRT bekerja sebagai pegawai	0,860*** -0,042	2,362*** 0,098
<i>Dummy</i> kepemilikan aset (1 = Ya)	0,351*** -0,050	1,420*** 0,069
<i>Dummy</i> kepemilikan tanah dan/rumah (1 = Ya)	-0,030 -0,035	0,97 0,033
Jumlah anggota rumah tangga	0,116*** -0,006	1,123*** 0,006
Pengeluaran rumah tangga (dalam <i>ln</i>)	0,052** -0,022	1,053** 0,023
<i>Dummy</i> status miskin (1 = Miskin)	-0,351*** -0,040	0,704*** 0,028
Keberadaan pengusaha pada rumah tangga (1 = Ada)	0,431*** -0,029	1,538*** 0,044
<i>Dummy</i> daerah tempat tinggal (1 = Perkotaan)	-0,058* -0,033	0,943* 0,031
PDRB per kapita (dalam <i>ln</i>)	-0,464*** -0,026	0,628*** 0,016
<i>Dummy</i> pulau tempat tinggal (1 = Pulau Jawa)	0,525*** -0,029	1,689*** 0,049
<i>Constant</i>	-0,639 -0,391	0,528 0,206

Lanjutan Tabel 5.

Variabel	Koefisien	RRR
Selain Koperasi		
Kepadatan koperasi	0,371	1,449
	-0,302	0,437
Dummy keberadaan lembaga keuangan lain (1 = Ya)	0,208***	1,231***
	-0,018	0,022
Dummy kepemilikan rekening (1 = Ya)	0,916***	2,499***
	-0,015	0,036
Jenis kelamin (1 = Laki-laki)	0,240***	1,271***
	-0,017	0,021
Umur	-0,010***	0,989***
	-0,001	0,0004
Pendidikan tingkat menengah KRT (Setingkat SMP dan SMA)	0,113***	1,119***
	-0,013	0,014
Pendidikan tingkat atas KRT (Di atas SMA)	-0,034	0,966***
	-0,021	0,020
KRT bekerja sebagai pengusaha	0,223***	1,249***
	-0,0233	0,029
KRT bekerja sebagai pegawai	0,524***	1,688***
	-0,022	0,036
Dummy kepemilikan aset (1 = Ya)	0,716***	2,045***
	-0,035	0,072
Dummy kepemilikan tanah dan/rumah (1 = Ya)	0,193***	1,213***
	-0,020	0,024
Jumlah anggota rumah tangga	0,041***	1,042***
	-0,004	0,003
Pengeluaran rumah tangga (dalam ln)	0,423***	1,526***
	-0,013	0,019
Dummy status miskin (1 = Miskin)	-0,253***	0,776***
	-0,026	0,020
Keberadaan pengusaha pada rumah tangga (1 = Ada)	0,382***	1,464***
	-0,017	0,024
Dummy daerah tempat tinggal (1 = Perkotaan)	-0,106***	0,899***
	-0,019	0,017
PDRB per kapita (dalam ln)	-0,251***	0,778***
	-0,014	0,011
Dummy pulau tempat tinggal (1 = Pulau Jawa)	0,455***	1,576***
	-0,018	0,028
Constant	-7,118***	0,001***
	-0,216	0,0002
N		283.478
Mc Fadden pseudo R ²		0,076
Prob > X ²		0,000

Keterangan: * signifikansi 10 persen, ** signifikansi 5 persen, *** signifikansi 1 persen.

Base category adalah yang tidak mengakses pembiayaan.

Sumber: Susenas Maret 2018 dan Podes 2018, diolah.

kepadatan koperasi daerah tempat tinggal signifikan pada tingkat signifikansi 10 persen. Nilai *p-value* pada variabel kepadatan koperasi sebesar 0,061. Artinya, kepadatan koperasi memengaruhi secara signifikan terhadap keputusan mengakses pembiayaan koperasi, *ceteris paribus*. Variabel kontrol lain, keberadaan lembaga keuangan, kepemilikan rekening, umur, pendidikan terakhir kepala rumah tangga tingkat atas (di atas SMA),

status pekerjaan (pengusaha dan pegawai), kepemilikan aset bergerak, jumlah anggota rumah tangga, status kemiskinan, keberadaan pengusaha dalam rumah tangga, PDRB per kapita, dan pulau tempat tinggal pada tingkat signifikansi 1 persen. Pada tingkat signifikansi 5 persen, variabel jenis kelamin, pendidikan terakhir kepala rumah tangga tingkat bawah (SMP dan SMA), dan pengeluaran rumah tangga. Sedangkan variabel daerah tempat

tinggal pada tingkat signifikansi 10 persen. Kepala rumah tangga yang bekerja formal atau pegawai akan meningkatkan peluang untuk melakukan pinjaman karena pendapatan dari bekerja tersebut tidak sepenuhnya dapat menutupi konsumsi harian (Beck & Brown, 2015).

Dari hasil regresi tampak bahwa semakin tinggi tingkat kepadatan koperasi, maka peluang rumah tangga untuk mengakses pembiayaan di koperasi semakin meningkat pada tingkat signifikansi 10 persen. Hasil ini sesuai dengan penelitian Burgess, Wong, dan Pande (2005) serta Kumar (2013) dengan banyaknya jumlah lembaga keuangan yang terdapat di suatu daerah akan mempermudah masyarakat untuk mengaksesnya sehingga dapat meningkatkan inklusi keuangan, *ceteris paribus*. Keberadaan lembaga keuangan selain perbankan seperti koperasi juga mampu meningkatkan peluang rumah tangga untuk mendapatkan pinjaman pada lembaga formal (Maulana, 2020). Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas koperasi, tetapi juga harus disertai dengan peningkatan kuantitas dan sebaran koperasi. Hal ini karena masih banyak wilayah yang belum terdapat koperasi, terutama di daerah luar Pulau Jawa. Dengan adanya koperasi diharapkan dapat menjadi alternatif pembiayaan bagi rumah tangga dan juga para pelaku usaha khususnya UMKM.

Tetapi berbeda pada keputusan mengakses di selain koperasi, kepadatan koperasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan mengakses pembiayaan selain koperasi, *ceteris paribus*. Sehingga berdasarkan hasil tersebut sebaiknya penumbuhan koperasi dilakukan pada daerah yang belum ada lembaganya. Untuk variabel kontrol, hampir semua variabel bebas mempunyai hubungan signifikan terhadap variabel terikat pada tingkat signifikansi 1 persen, kecuali pendidikan kepala rumah tangga tingkat atas (di atas SMA) tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan mengakses pembiayaan selain koperasi, *ceteris paribus*. Hal ini dikarenakan kepala keluarga yang berpendidikan tinggi belum tentu mengakses pembiayaan di selain koperasi (Kredit Usaha Rakyat/KUR, kredit dari bank umum selain KUR, kredit dari Bank Perkreditan Rakyat/BPR, Pegadaian, perusahaan *leasing*, Kelompok Usaha Bersama/KUBE/KUB, dan Badan Usaha Milik Desa/BUMDes dan lainnya). Pendidikan dalam variabel ini bersifat umum di mana diasumsikan bahwa pendidikan memiliki keterkaitan dengan variabel pengetahuan terhadap lembaga keuangan. Kepala keluarga yang berpendidikan tinggi namun jika tidak memiliki pengetahuan mengenai akses pembiayaan lembaga selain koperasi, kemungkinan tidak akan

tertarik mengakses pembiayaan selain koperasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nugroho & Purwanti (2018) tidak ada pengaruh pendidikan pada probabilitas meminjam dari lembaga keuangan formal.

Selain variabel utama terdapat beberapa variabel kontrol yang secara statistik signifikan berhubungan dengan preferensi rumah tangga dalam memilih akses pembiayaan dibandingkan tidak mengakses pembiayaan. Keberadaan lembaga keuangan lain memengaruhi keputusan mengakses pembiayaan di koperasi. Seperti penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan, memungkinkan masyarakat untuk beralih ke penyedia layanan keuangan alternatif lain (Barr, 2004; Campero & Kaiser, 2013). Kepemilikan rekening bank salah seorang anggota rumah tangga juga memengaruhi terhadap keputusan mengakses pembiayaan, karena sebagian lembaga keuangan mensyaratkan pemilikan rekening bank untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan.

Pada karakteristik individu kepala rumah tangga, yaitu jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan berhubungan positif dengan preferensi rumah tangga dalam mengakses pembiayaan di koperasi atau selain koperasi dibandingkan tidak mengakses pembiayaan. Di mana pembiayaan lebih cenderung diakses oleh jenis kelamin laki-laki. Sejalan dengan penelitian di India, jenis kelamin mempunyai peranan penting di dalam inklusi keuangan, terdapat perbedaan yang signifikan baik dalam akses maupun penggunaan layanan keuangan. Rumah tangga yang dikepalai oleh wanita lebih sedikit menggunakan pinjaman dibandingkan rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki (Ghosh & Vinod, 2017). Tingkat pendidikan kepala rumah tangga menengah (SMP dan SMA) lebih cenderung mengakses pembiayaan dibanding tingkat pendidikan bawah (di bawah SMP).

Karakteristik individu lainnya yaitu usia, usia mempunyai hubungan negatif dengan preferensi rumah tangga dalam mengakses pembiayaan di koperasi atau selain koperasi dibandingkan tidak mengakses pembiayaan. Hal ini kemungkinan dikarenakan adanya persyaratan usia tertentu untuk dapat mengakses pembiayaan. Tingkat usia tersebut mendorong kepercayaan pemberi pinjaman kepada peminjam (Abaru et al., 2006). Dalam hal status pekerjaan, kepala rumah tangga yang bekerja sebagai pengusaha atau pegawai lebih cenderung mengakses pembiayaan dibanding kepala rumah tangga yang tidak bekerja. Pinjaman tersebut dapat digunakan sebagai modal usaha yang nantinya berdampak pada peningkatan pendapatan sehingga rumah tangga tersebut menjadi lebih sejahtera (Li, 2018).

Kepemilikan aset bergerak berhubungan positif dengan preferensi rumah tangga memilih mengakses pembiayaan di koperasi dibanding tidak mengakses pembiayaan dan memilih mengakses pembiayaan di selain koperasi. Hal ini terjadi karena sebagian besar lembaga keuangan mensyaratkan jaminan untuk mengakses pembiayaan. Sehingga sejalan dengan status ekonomi rumah tangga, di mana status ekonomi rumah tangga (tingkat kemiskinan) menggunakan data BPS, penduduk dikatakan miskin jika pengeluaran per kapita per bulannya berada di bawah garis kemiskinan. Status ekonomi rumah tangga berhubungan negatif dengan preferensi rumah tangga dalam mengakses pembiayaan, rumah tangga miskin akan lebih cenderung tidak mengakses pembiayaan dibandingkan rumah tangga tidak miskin, yang kemungkinan disebabkan oleh kepemilikan jaminan pada rumah tangga. Hal ini sesuai dengan penelitian Lewis (1993) bahwa rumah tangga miskin tidak dapat mengakses lembaga keuangan formal salah satunya karena tidak mempunyai aset berharga yang dapat digadaikan.

Selain itu, jumlah anggota rumah tangga dan pengeluaran rumah tangga berhubungan positif dengan preferensi rumah tangga dalam mengakses pembiayaan di koperasi atau selain koperasi dibandingkan dengan tidak mengakses pembiayaan. Rumah tangga yang lebih banyak jumlah anggota rumah tangga akan cenderung memilih mengakses pembiayaan baik itu di koperasi atau selain koperasi dibanding tidak mengakses pembiayaan. Hal ini karena dengan banyaknya jumlah anggota keluarga maka pengeluaran rumah tangga pun akan semakin besar (Campero & Kaiser, 2013). Banyaknya anggota rumah tangga mengakibatkan besarnya pengeluaran, sehingga rumah tangga membutuhkan pendapatan tambahan melalui pembiayaan di lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya, selain untuk konsumsi, banyaknya anggota rumah tangga juga mendorong untuk menambah penghasilan dengan cara membuka usaha. Koperasi menjadi salah satu pilihan untuk mendapatkan modal usaha. Keberadaan pengusaha dalam rumah tangga pun berhubungan positif dengan preferensi rumah tangga dalam mengakses pembiayaan di koperasi atau selain koperasi dibandingkan dengan tidak mengakses pembiayaan. Ini karena pengusaha akan lebih membutuhkan pembiayaan untuk modal atau peningkatan volume usahanya.

Perihal karakteristik wilayah, yaitu daerah tempat tinggal, rumah tangga yang mengakses pembiayaan di koperasi lebih banyak bertempat tinggal di perdesaan, berbeda dengan yang mengakses pembiayaan di selain koperasi lebih banyak yang bertempat tinggal di perkotaan.

Karakteristik wilayah mempunyai hubungan negatif dengan preferensi rumah tangga dalam mengakses pembiayaan di koperasi atau selain koperasi dibandingkan dengan tidak mengakses pembiayaan. Terdapat perbedaan antara akses pembiayaan bank dan pembiayaan pemerintah, masyarakat perkotaan lebih cenderung mengakses pada pembiayaan bank, dikarenakan di daerah perkotaan banyak terdapat lembaga keuangan (bank) yang dapat diakses oleh masyarakat. Sedangkan masyarakat pedesaan lebih banyak meminjam pada pembiayaan pemerintah dan lebih banyak pembiayaan informal (Campero & Kaiser, 2013; Deku et al., 2016).

PDRB per kapita kabupaten/kota pun berhubungan negatif dengan preferensi rumah tangga dalam mengakses pembiayaan di koperasi atau selain koperasi dibandingkan dengan tidak mengakses pembiayaan. Dengan kata lain, semakin tinggi PDRB per kapita suatu wilayah akan meningkatkan peluang rumah tangga tidak mengakses pembiayaan. Hal tersebut karena PDRB per kapita dapat dihubungkan dengan tingkat pendapatan yang tinggi sehingga rumah tangga tidak lagi membutuhkan pembiayaan.

Analisis selanjutnya adalah *Risk Relative Ratio* (RRR), di mana RRR merupakan perbandingan peluang terjadinya dari suatu kejadian. Nilai RRR yang melebihi angka 1 mengindikasikan rumah tangga memiliki peluang lebih besar untuk mengambil keputusan mengakses pembiayaan (koperasi/ selain koperasi) dibandingkan tidak mengakses pembiayaan. Perbandingan peluang pada tiap model ini menggunakan *base category*, yaitu tidak mengakses pembiayaan. Penentuan nilai RRR hanya akan memerhatikan pada variabel-variabel yang signifikan saja.

Hasil analisis RRR, memperlihatkan bahwa jika tingkat kepadatan koperasi di desa meningkat satu unit/km² maka akan meningkat peluang sebesar 3,407 kali memilih mengakses pembiayaan di koperasi dibandingkan dengan tidak mengakses pembiayaan, *ceteris paribus*. Berdasarkan hasil RRR menunjukkan bahwa adanya lembaga keuangan lain di desa akan meningkatkan peluang sebesar 1,106 kali memilih mengakses pembiayaan di koperasi dibandingkan dengan tidak mengakses pembiayaan, dan 1,2311 kali memilih mengakses pembiayaan di selain koperasi dibandingkan dengan tidak mengakses pembiayaan, *ceteris paribus*. Hal ini sejalan dengan penelitian Kumar (2013) yang menjelaskan kepadatan lembaga keuangan, memiliki dampak positif yang kuat untuk mengakses layanan keuangan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepadatan koperasi berpengaruh positif dan signifikan

terhadap keputusan rumah tangga mengakses koperasi. Semakin tinggi tingkat kepadatan koperasi, maka peluang rumah tangga untuk mengakses pembiayaan di koperasi semakin meningkat. Dengan banyaknya jumlah lembaga keuangan yang terdapat di suatu daerah akan mempermudah masyarakat untuk mengaksesnya sehingga dapat meningkatkan inklusi keuangan. Pemerintah diharapkan jangan hanya berfokus pada peningkatan kualitas koperasi, tetapi harus disertai dengan peningkatan kuantitas dan sebaran koperasi. Hal ini karena masih banyak daerah yang belum ada koperasinya terutama di daerah luar Pulau Jawa. Namun kepadatan koperasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan rumah tangga mengakses pembiayaan di selain koperasi. Sehingga berdasarkan hasil tersebut sebaiknya penumbuhan koperasi dilakukan pada daerah yang belum ada lembaga keuangannya.

Kepadatan koperasi meningkatkan keputusan akses pembiayaan rumah tangga terhadap koperasi sehingga dengan bertambahnya jumlah koperasi akan meningkatkan inklusi keuangan sehingga dapat membantu masyarakat yang membutuhkan pinjaman sehingga pemerintah perlu mendukung program penumbuhan koperasi, khususnya pada daerah yang belum ada lembaga keuangannya. Selain itu, penumbuhan koperasi disarankan pada daerah yang memiliki jumlah pengusaha atau UMKM yang banyak. Ini karena berdasarkan keberadaan pengusaha dalam rumah tangga meningkatkan rumah tangga mengakses pembiayaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Chaikal Nuryakin, Ph.D, Prani Sastiono, Ph.D, Muhammad Hanri, Ph.D, Resa Surya Utama, ME dan Kementerian Koperasi dan UKM atas saran, masukan, dan dukungan data pada penelitian ini. Nopitasari berterima kasih atas program beasiswa magister dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gujarati, D.N., & Porter, D.C. (2009). *Basic econometric. 5th Edition*. New York: McGraw-Hill.
- Nachrowi, D.N., & Usman, H. (2008). *Penggunaan teknik ekonometri pendekatan populer & praktis dilengkapi teknik analisis & pengolahan data dengan menggunakan paket Program SPSS*. Edisi Revisi (hal. 297-318). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- World Bank. (2008). *Finance for all? Policies and pitfalls in expanding access*. In *World Bank Policy Research Report*. Washington, DC.: World Bank.
- Zeller, M. (2001). *Shielding the poor: Social protection in the developing world, The safety net role of microfinance for income and consumption smoothing*. Washington, DC.: Brookings Institution Press.

Jurnal dan Working Paper

- Abaru, B.M., Muger, A.W., Norman, D.W., & Featherstone, A.M. (2006). The Uganda rural farmers scheme: Women's accessibility to agricultural credit. *Agricultural Finance Review*, 66(2), 215-234.
- Ayamga, M., Sarpong, D.B., & Asuming-Brempong, S. (2006). Factors influencing the decision to participate in micro-credit programme: An illustration for Northern Ghana. *Ghana Journal of Development Studies*, 3(2), 57-65.
- Barr, M.S. (2004). Banking the poor: Policies to bring low-income Americans into the financial mainstream. *University of Michigan Law & Economics Working Paper Series No. 48*.
- Beck, T., & Brown, M. (2015). Foreign bank ownership and household credit. *Journal of Financial Intermediation*, 24(4), 466-486.
- Beck, T., Demirciguc-Kunt, A., & Martinez Peria, M.S. (2007). Reaching out: Access to and use of banking services across countries. *Journal of Financial Economics*, 85(1), 234-266.
- Besley, T., & Coate, S. (1995). Group lending, repayment incentives and social collateral. *Journal of Development Economics*, 46(1), 1-18.
- Bharadwaj, B. (2012). Roles of cooperatives in poverty reduction: A case of Nepal. *Administration and Management Review*, 24(1), 120-139.
- Brown, M., Guin, B., & Kirschenmann, K. (2016). Microfinance Banks and Financial Inclusion. *Review of Finance*, 20(3), 907-946.
- Campero, A., & Kaiser, K. (2013). Access to credit: Awareness and use of formal and informal credit institutions. *Working Papers No. 2013-07*.
- Deku, S. Y., Kara, A., & Molyneux, P. (2016). Access to consumer credit in the UK. *The European Journal of Finance*, 22(10), 941-964.
- Fenton, A., Paavola, J., & Tallontire, A. (2017). The role of microfinance in household livelihood adaptation in Satkhira District, Southwest Bangladesh. *World Development*, 92, 192-202.

- Fungáčová, Z., & Weill, L. (2015). Understanding financial inclusion in China. *China Economic Review*, 34(14), 196-206.
- Ghalib, A.K., Malki, I., & Imai, K.S. (2011). The impact of microfinance and its role in easing poverty of rural households: Estimations from Pakistan. *Kobe University. Working Papers* No. 28.
- Ghosh, S., & Vinod, D. (2017). What Constrains Financial Inclusion for Women? Evidence from Indian Micro data. *World Development*, 92(5), 60–81.
- Imai, K.S., Arun, T., & Anim, S.K. (2010). Microfinance and household poverty reduction: New evidence from India. *World Development*, 38(12), 1760-1774.
- John, K., Knyazeva, A., & Knyazeva, D. (2011). Does geography matter? Firm location and corporate payout policy. *Journal of Financial Economics*, 101(3), 533-551.
- Kabakova, O., & Plaksenkov, E. (2018). Analysis of factors affecting financial inclusion: Ecosystem view. *Journal of Business Research*, 89 (21), 198-205.
- Kumar, N. (2013). Financial inclusion and its determinants: evidence from India. *Journal of Financial Economic Policy*, 5(1), 4-19.
- Kumar, A., Pal, R., & Pal, R. (2019). Usage of formal financial services in India: Demand barriers or supply constraints?. *Economic Modelling*, 80(20), 244–259.
- Li, L. (2018). Financial inclusion and poverty: The role of relative income. *China Economic Review*, 52(1), 165–191.
- Modigliani, F. (1986). Life cycle, individual thrift, and the wealth of nations. *Science*, 234(4777), 704-712.
- Nugroho, A., & Purwanti, E. Y. (2018). Determinan inklusi keuangan di Indonesia (Global Findex 2014). *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 1-13.
- Rama, A. S. (2016). Peranan religiusitas dan preferensi resiko terhadap akses kepada Lembaga Keuangan Mikro. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 83-96.
- Sanjaya, I.M., & Nursechafia, N. (2016). Financial inclusion and inclusive growth: A cross-province analysis in Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 18(3), 281-306.
- Santoso, D.B., & Gan, C. (2019). Microcredit accessibility in rural households: Evidence from Indonesia. *Economics and Finance in Indonesia*, 65(1), 67-88.
- Sarma, M. (2008). Index of financial inclusion. *Indian Council for Research on International Economic Relations Working Paper* No. 215.
- Stiglitz, J.E., & Weiss, A. (1981). Credit rationing in markets with imperfect information. *The American Economic Review*, 71(3), 393-410.
- Verhofstadt, E., & Maertens, M. (2015). Can agricultural cooperatives reduce poverty? Heterogeneous impact of cooperative membership on farmers' welfare in Rwanda. *Applied Economic Perspectives and Policy*, 37(1), 86-106.

Tesis

- Maulana, R. (2020). Inklusi keuangan: Pengaruh kepemilikan rekening dan ketersediaan akses lembaga keuangan terhadap pinjaman rumah tangga. *Tesis*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Universitas Indonesia.

Laporan

- Bank Indonesia & LPPI. (2015). Profil bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Jakarta: Bank Indonesia & LPPI.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2018). Laporan kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM.

Makalah

- Ahsan, A.& Nurmayanti, E. (2016). Cooperatives in Indonesia: Recent conditions and challenges. *Makalah*. Universitas Indonesia.

Website

- Badan Pusat Statistik. (2019). Persentase penduduk miskin Maret 2019 sebesar 9,41 persen. Badan Pusat Statistik. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Diperoleh tanggal 11 November 2019 dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen>.
- Indrawan, R. (2019). Sinergitas pengembangan KUMKM melalui penguatan peran antar lembaga. Diperoleh tanggal 01 Desember 2020, dari http://www.depkip.go.id/uploads/laporan/1566564351_Bahan%20Paparan%20SESMENEGKOP%20Sinergitas%20Pengembangan%20KUMKM%20melalui%20Penguatan%20Peran%20Antar%20Lembaga.pdf.